



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 123/Bua.2/07/4/2015
Lampiran :
Hal : Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan
Penetapan Pensiun Secara Langsung
(Pensiun Otomatis)

Jakarta, 16 April 2015

- Yth. **1. SEKRETARIS PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI**
2. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI
4. SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI
5. SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
6. SEKRETARIS BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI
7. PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI SELURUH INDONESIA

di-
TEMPAT

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan penetapan pensiun secara langsung atau Pensiun Otomatis (PO), maka dengan ini kami berikan data-data pegawai yang akan pensiun pada tahun 2016. Untuk mewujudkan Pensiun secara Langsung atau Pensiun Otomatis (PO) tersebut, kami mengharapkan agar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapak/ Ibu untuk segera melengkapi data atau memperbaiki data pendukungnya berdasarkan format yang sudah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (format terlampir) dan mengirimkan kembali kepada kami paling lambat tanggal 24 April 2015, mohon kiranya dikirim melalui alamat email : ppbirokepegmari@gmail.com. Apabila Bapak/ Ibu tidak melengkapi/ memperbaiki data pendukung Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungannya, maka kami anggap data tersebut sudah benar dan akan kami gunakan sebagai data usulan pensiunnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. **SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI**
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Drs. AGUS ZAINAL MUTAQIEN, S.H.
NIP. 19590315 198303 1 007

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
8. Arsip.